

Mengakselerasi SDGs No Poverty: Bukti Empiris dari Ketimpangan Pendapatan, IPM, dan UMK di Jawa Tengah

Irfan Wahab Sayekti^{1✉} Didit Purnomo²

^{1,2} *Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta*

Abstract

This research endeavor seeks to examine the impact of the Human Development Index (HDI), Gini Coefficient, unemployment metrics, and District Minimum Wage (DMW) on the poverty levels across districts in the Central Java province during the timeframe of 2021 to 2024. The analytical approach employed involves panel data regression utilizing a Fixed Effect Model (FEM) based on the outcomes derived from the Chow Test and Hausman Test. The dataset comprises secondary data sourced from the Central Statistical Agency, encompassing a total of 140 observations. The findings of this investigation reveal that the HDI exerts a negative and statistically significant influence on poverty, whereas both the Gini Coefficient and DMW demonstrate a positive and significant correlation. In contrast, the unemployment rate does not exhibit a statistically significant effect. Collectively, all variables are observed to have an impact on poverty levels. These results underscore the critical role of enhancing human development quality and achieving equitable income distribution as mechanisms for alleviating regional poverty.

Keywords: *Poverty; Human Development Indeks; Gini Indeks; Unemployment; Minimum Wage*

Copyright (c) 2026 Nama Penulis

✉ Corresponding author :

Email Address : b300220019@student.ums.ac.id

PENDAHULUAN

Meningkatnya insiden kemiskinan di Indonesia tetap menjadi kendala yang cukup besar dalam konteks agenda pembangunan nasional. Data statistik dari Badan Statistik Pusat menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mencapai 8,25% per September 2025. Meskipun ini menunjukkan pengurangan, itu masih menyiratkan bahwa jutaan individu ada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya mencakup keterbatasan keuangan tetapi juga mewujudkan kekurangan dalam akses ke peluang pendidikan, layanan kesehatan, prospek pekerjaan, dan standar hidup yang memadai. Akibatnya, mitigasi kemiskinan telah muncul sebagai indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pencapaian pembangunan (Kharisma et al., 2026).

Kompleksitas kemiskinan menjadi lebih terlihat ketika diteliti di tingkat daerah, terutama di provinsi-provinsi dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam seperti Jawa Tengah. Kesenjangan antara kabupaten dan kotamadya mengenai kemajuan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi pasar tenaga kerja menggambarkan bahwa kemiskinan bergantung secara kontekstual. Situasi ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan universal semakin tidak memadai, sehingga memerlukan pemeriksaan yang lebih bernuansa (Septiadi & Nursan, 2020).

Unsur penting yang menjelaskan kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia, sebagaimana diartikulasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM mengevaluasi kemajuan perkembangan melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dari sudut pandang teori modal manusia, investasi dalam pendidikan dan perawatan kesehatan dianggap sebagai mekanisme untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu (Schultz, 1961; Becker, 1964). Sudut pandang ini menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam mendorong kemakmuran ekonomi (Arifin, 2023). Dengan demikian, peningkatan IPM diantisipasi untuk memfasilitasi pengurangan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kapasitas ekonomi penduduk (Hasan et al., 2020).

Selain kualitas sumber daya manusia, kesenjangan dalam alokasi pendapatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Koefisien Gini digunakan sebagai metrik untuk menilai tingkat ketidaksetaraan tersebut. Tingkat ketidaksetaraan yang meningkat menunjukkan bahwa keuntungan pembangunan tidak disebarluaskan secara merata di berbagai strata masyarakat (Samiani et al., 2024). Dalam hal ini, populasi tertentu terus mengalami kemiskinan meskipun ada kemajuan ekonomi secara keseluruhan (Kharisma et al., 2026). Dari sudut pandang pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran berfungsi sebagai indikator kemampuan ekonomi daerah untuk mengakomodasi tenaga kerja. Secara teoritis, tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan risiko kemiskinan karena berkurangnya sumber pendapatan rumah tangga. Meskipun demikian, dalam konteks ekonomi berkembang, asosiasi ini tidak selalu linier karena peran penting sektor informal (Mohini & Hasmarini, 2022).

Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan mekanisme pemerintah yang dirancang untuk memastikan ambang batas pendapatan minimum bagi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, peningkatan upah minimum diantisipasi untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di kalangan demografi berpenghasilan rendah. Namun, kemanjuran kebijakan tersebut sebagian besar bergantung pada kondisi struktural ekonomi regional dan dinamika pasar tenaga kerja yang berlaku (Kharisma et al., 2026). Sebaliknya, berbagai penyelidikan menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu kemiskinan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketidaksetaraan pendapatan, pengangguran, dan kebijakan upah, terus menghasilkan hasil empiris yang tidak konsisten, terutama mengenai peran pengangguran dan upah minimum. Akibatnya, analisis yang lebih kontekstual diperlukan di tingkat regional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-pandemi di Jawa Tengah selama periode 2021 – 2024.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dampak IPM, Indeks Gini, tingkat pengangguran, dan MSK terhadap kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah, baik secara terpisah maupun kolektif, dengan menggunakan metodologi regresi data panel. Keaslian penelitian ini dimanifestasikan dalam tiga dimensi utama. Pertama, fokus pada periode 2021 – 2024 memungkinkan penangkapan dinamika kemiskinan selama fase pemulihan pasca-pandemi, yang relatif belum dieksplorasi. Kedua, temuan penelitian ini menyimpang dari teori tradisional, terutama menyoroti tidak pentingnya pengangguran dan dampak afirmatif UMKM terhadap kemiskinan, sehingga mencerminkan seluk-beluk pasar tenaga kerja yang sebagian besar dipengaruhi oleh sektor informal. Ketiga, penerapan Model Efek Tetap di tingkat kabupaten/kota memfasilitasi pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap heterogenitas karakteristik daerah, sehingga menyumbangkan wawasan empiris baru pada wacana tentang kemiskinan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan hambatan besar dalam domain pembangunan ekonomi, terutama terlihat di negara-negara yang diklasifikasikan sebagai berkembang, dan didefinisikan oleh ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan esensial mereka untuk kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan penting ini mencakup rezeki, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan akses ke peluang ekonomi. Dari perspektif ekonomi pembangunan kontemporer, kemiskinan melampaui ketidakcukupan pendapatan sederhana; itu dianggap sebagai batasan akses ke peluang sosial dan ekonomi yang lebih luas. Akibatnya, kemiskinan dipahami sebagai masalah multidimensi yang menunjukkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Interpretasi ini telah diadopsi oleh banyak organisasi internasional, termasuk Bank Dunia dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dalam upaya mereka untuk membangun kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk penilaian kemiskinan yang mengintegrasikan aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan layanan vital dan infrastruktur publik.

Evaluasi kemiskinan secara resmi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metodologi garis kemiskinan. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat minimum pengeluaran per kapita yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan non-pangan untuk standar hidup yang terhormat. Kebutuhan nutrisi didasarkan pada standar konsumsi dasar 2100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan kebutuhan non-pangan termasuk pengeluaran yang terkait dengan perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Individu dengan pengeluaran jatuh di bawah ambang batas ini dikategorikan sebagai miskin. Menurut data BPS, per September 2024, populasi Indonesia yang hidup dalam kemiskinan berjumlah 24,06 juta, yang menyumbang sekitar 8,57 persen dari total populasi. Selanjutnya, dalam skala global, Bank Dunia menetapkan tolok ukur kemiskinan ekstrim sebesar 3 dolar AS setiap hari, disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP), untuk tujuan perbandingan internasional.

Kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait yang mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Kualitas sumber daya manusia adalah aspek penting, karena mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan dan diberi kompensasi yang memadai. Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan selanjutnya berkontribusi pada keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi untuk demografi tertentu, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan. Selain itu, kondisi pasar tenaga kerja, khususnya tingkat pengangguran, memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebaliknya, kebijakan ekonomi, termasuk intervensi pemerintah mengenai struktur upah dan pembangunan sosial, juga dapat mempengaruhi kesejahteraan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang luas tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan sangat penting sebagai dasar untuk menyusun strategi pembangunan yang efektif dan bertarget, terutama dalam konteks evaluasi kemiskinan regional.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai efektivitas pembangunan manusia dalam area tertentu. Sejak didirikan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990, IPM telah beroperasi sebagai ukuran gabungan yang menekankan tidak hanya kemajuan ekonomi tetapi juga kualitas hidup komprehensif yang dialami oleh individu. Tidak seperti metrik tradisional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, HDI memberikan gambaran kesejahteraan yang lebih rumit dengan memasukkan elemen non-ekonomi (Pratiwi, 2025). Secara teoritis, IPM menyoroti gagasan bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia, bukan hanya terkonsentrasi pada output ekonomi. Dalam kerangka ini, pembangunan manusia didefinisikan sebagai peningkatan pilihan manusia, yang mencakup akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan standar hidup yang memadai sebagai konstituen vital kesejahteraan (Yulianti & Qomariah, 2025).

Pengukuran HDI disusun di sekitar tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dimensi kesehatan diwakili oleh harapan hidup, sedangkan aspek pendidikan dievaluasi melalui rata-rata tahun sekolah dan tahun-tahun pendidikan yang diantisipasi. Komponen yang berkaitan dengan standar hidup dinilai melalui pengeluaran per kapita riil, yang berfungsi sebagai ukuran daya beli individu. Bersama-sama, ketiga dimensi ini melambangkan kapasitas manusia yang penting untuk terlibat dalam kehidupan yang produktif (Yulianti & Qomariah, 2025). Dalam konteks Indonesia, IPM mencerminkan tren yang menguntungkan, menunjukkan kemajuan dalam kualitas pembangunan manusia, meskipun perbedaan di berbagai daerah tetap ada (Wijayanti & Raihansyah, 2024). Secara teoritis, peningkatan IPM diharapkan dapat memfasilitasi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan, sebuah proposisi yang didukung oleh data empiris yang menunjukkan korelasi negatif yang signifikan antara IPM dan tingkat kemiskinan (Putri, 2024).

H1: *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.*

Indeks Gini

Koefisien Gini berfungsi sebagai indikator untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan dalam wilayah tertentu, menjelaskan sejauh mana alokasi pendapatan menyimpang dari kondisi kesetaraan absolut. Nilai koefisien Gini berkisar dari 0 hingga 1; nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih adil, sedangkan yang mendekati 1 menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang signifikan. Perhitungan koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, representasi visual yang membedakan distribusi pendapatan kumulatif dengan distribusi populasi kumulatif. Semakin besar kesenjangan antara kurva Lorenz dan garis diagonal yang mewakili kesetaraan ideal, semakin jelas ketidaksetaraan tersebut. Akibatnya, koefisien Gini telah menjadi instrumen penting untuk menilai komparabilitas distribusi ekonomi di berbagai tahap pembangunan (Akbar, 2019).

Dari perspektif ekonomi pembangunan, disparitas pendapatan sering berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi non-inklusif. Kemajuan ekonomi yang ditingkatkan tidak secara intrinsik mengarah pada distribusi pendapatan yang seragam, mengakibatkan kelompok demografis tertentu tidak dapat memperoleh keuntungan yang sepadan dari pembangunan (Kholis & Gunarto, 2025). Secara teoritis, ketidaksetaraan yang terus-menerus dapat memperburuk kemiskinan dengan membatasi akses individu ke aset ekonomi. Temuan empiris menunjukkan bahwa

kenaikan koefisien Gini biasanya terkait dengan peningkatan proporsi populasi yang mengalami kemiskinan (Padmono, 2025). Selain itu, konsentrasi pendapatan di antara kohort tertentu dapat menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi dan melanggengkan kesenjangan sosial, yang pada akhirnya menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan tingkat kemiskinan (Setya & Tohirin, 2025).

H2: Indeks Gini berpengaruh positif terhadap kemiskinan

Pengangguran

Pengangguran menandakan suatu kondisi di mana individu yang diklasifikasikan dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan sementara secara aktif mencari peluang kerja. Badan Pusat Statistik mencirikan pengangguran terbuka sebagai sebagian kecil dari demografi usia kerja yang tidak terlibat dalam kegiatan ketenagakerjaan apa pun namun aktif mencari prospek pekerjaan, bersiap untuk memulai usaha bisnis, atau telah sungguh-sungguh mencari pekerjaan (Badan Pusat Statistika Indonesia, 2021). Dari sudut pandang teoritis, pengangguran dibagi lagi menjadi tiga kategori berbeda: gesekan, struktural, dan siklus. Pengangguran gesekan muncul dari perpindahan tenaga kerja, sementara pengangguran struktural berkaitan dengan ketidakselarasan antara keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja dan tuntutan pasar tenaga kerja. Pengangguran siklus terkait dengan fluktuasi aktivitas ekonomi. Dalam ranah ekonomi pembangunan, pengangguran menunjukkan perbedaan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang dapat menghambat kemajuan ekonomi (Saribulan et al., 2023).

Secara praktis, fenomena pengangguran dipengaruhi tidak hanya oleh ketersediaan posisi pekerjaan tetapi juga oleh masalah ketidakcocokan keterampilan antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Selain itu, kecenderungan individu terhadap jenis pekerjaan tertentu juga dapat memperpanjang durasi pengangguran (Jannah et al., 2021). Secara teoritis, ada korelasi yang signifikan antara pengangguran dan kemiskinan, karena hilangnya pekerjaan setara dengan hilangnya sumber pendapatan. Investigasi empiris menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran dapat mengintensifkan tingkat kemiskinan, terutama ketika individu kekurangan sumber pendapatan alternatif (Kholis & Gunarto, 2025). Namun, hubungan ini tidak jelas secara universal, terutama di daerah yang sebagian besar dicirikan oleh sektor informal, di mana pengangguran tersembunyi memungkinkan individu untuk mempertahankan beberapa bentuk pekerjaan, meskipun disertai dengan penurunan produktivitas dan pendapatan.

H3: Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan

Upah Minimum

Upah minimum berfungsi sebagai instrumen kebijakan penting yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan standar upah sambil memastikan perlindungan kesejahteraan pekerja. Biasanya, upah minimum merupakan tolok ukur mendasar yang wajib dibayar oleh pengusaha untuk memungkinkan karyawan memenuhi kebutuhan hidup penting mereka (Setya & Tohirin, 2025). Di tingkat daerah, kebijakan ini ditetapkan sebagai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang ditetapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan standar hidup yang lazim di setiap daerah. Tujuan utama mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) adalah untuk menjaga daya beli individu dan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Dari perspektif ekonomi pembangunan, UMKM dianggap sebagai mekanisme redistribusi pendapatan, yang mampu meningkatkan kesejahteraan

kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi, terutama mengingat tingkat upah rendah sering menjadi katalis utama kemiskinan (Mauludi & Nur Rahmawati, 2023).

Secara teoritis, perluasan UKM diharapkan dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli bagi pekerja. Studi empiris menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum dapat memberikan efek buruk yang signifikan pada tingkat kemiskinan, menyiratkan bahwa kenaikan upah berkontribusi pada penurunan populasi miskin (Setya & Tohirin, 2025). Meskipun demikian, berbagai investigasi telah menghasilkan hasil yang berbeda, menunjukkan bahwa UMKM memang dapat berdampak positif pada pengurangan kemiskinan (Sutikno RY et al., 2019). Situasi ini terjadi ketika kenaikan upah tidak disertai dengan peningkatan produktivitas dan permintaan tenaga kerja yang setara, sehingga meningkatkan biaya produksi dan berpotensi mengakibatkan pengurangan tenaga kerja (PHK). Selain itu, tekanan biaya juga dapat memicu inflasi, sehingga memperburuk daya beli individu.

H4: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

H5: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, pengangguran, dan UMK secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis kuantitatif yang dilengkapi dengan kerangka analisis deduktif untuk menilai hubungan antara variabel yang diusulkan dalam hipotesis. Pendekatan ini menekankan penerapan data numerik di samping metode analisis statistik untuk menentukan arah, besarnya, dan signifikansi interaksi antar-variabel (Sugiyono, 2023). Dalam konteks ini, penelitian ini dirancang untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan melalui model regresi data panel, yang memungkinkan penggabungan aspek temporal dan regional secara bersamaan.

Unit analitik dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten dan kotamadya di Provinsi Jawa Tengah, dengan total 35 wilayah. Studi ini menghindari teknik pengambilan sampel demi metodologi sensus, sehingga melibatkan seluruh populasi sebagai titik fokus analisis. Pendekatan ini dipilih untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan mengurangi potensi bias terkait dengan pemilihan sampel, sehingga memastikan bahwa hasil penelitian diharapkan secara akurat dan menyeluruh mencerminkan lanskap kemiskinan regional.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Penerapan data sekunder dijamin karena bersifat empiris, dapat diukur, dan memiliki tingkat validitas yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2023). Data yang digunakan adalah data panel, yang menggabungkan data deret waktu dengan data cross-sectional. Aspek temporal mencakup tahun 2021 hingga 2024, sedangkan ruang lingkup geografis mencakup 35 kabupaten dan kota, yang berpuncak pada total 140 pengamatan untuk penelitian ini.

Analisis menggabungkan satu variabel dependen bersama dengan empat variabel independen. Variabel dependen dioperasionalkan sebagai tingkat kemiskinan, dievaluasi secara kuantitatif melalui persentase populasi yang diidentifikasi sebagai miskin. Variabel independen meliputi Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), Indeks Gini, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Alasan untuk memilih variabel-variabel ini didasarkan pada ketersediaan data interregional dan intertemporal yang konsisten, serta relevansinya dalam menjelaskan secara empiris dinamika kemiskinan regional. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 GINI_{it} + \beta_3 UNMP_{it} + \beta_4 UMK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Metode Estimasi

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan regresi data panel. Metode analitik ini menggabungkan data dari individu yang beragam selama interval temporal, sehingga memfasilitasi eksplorasi heterogenitas di antara unit pengamatan di samping dinamika variasi temporal (Amaliah et al., 2020). Analisis ini mencakup tiga model utama: Model Efek Umum (CEM), Model Efek Tetap (FEM), dan Model Efek Acak (REM) (Biotics, 2025). CEM menandakan model paling dasar, mengandaikan homogenitas dalam atribut dan waktu individu, dan dihitung menggunakan Kotak Terkecil Biasa (OLS) (Putri et al., 2025). Sebaliknya, FEM mengakui perbedaan karakteristik di seluruh unit dengan mengizinkan intersepsi yang bervariasi, sehingga secara efektif menangkap efek berbeda yang berkaitan dengan setiap wilayah (Mahfudhotin & Sari, 2025). Sebaliknya, REM berpendapat bahwa variasi antar unit bersifat stokastik dan independen dari variabel independen, dan diperkirakan melalui Kuadrat Terkecil Umum (GLS).

Penentuan model optimal ditambah melalui serangkaian tes, terutama uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, uji Hausman untuk membedakan antara FEM dan REM, dan uji Pengganda Lagrange untuk membandingkan CEM dan REM (Hayati, 2025). Selain itu, validitas model dievaluasi melalui uji asumsi klasik, yang mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, untuk memastikan kepatuhan pada kriteria Best Linear Unbias Estimator (BLUE) (Nurhidayah et al., 2025). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F untuk menilai pengaruh kolektif dari variabel independen, bersamaan dengan uji-t untuk mengevaluasi dampak individu dari setiap variabel (Arjeti & Magdalena, 2025). Selanjutnya, koefisien penentuan digunakan untuk mengukur efektivitas model dalam menjelaskan varians variabel dependen, dengan peningkatan nilai yang menunjukkan model yang unggul dalam mengklarifikasi fenomena yang diteliti (Setyaputri et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil Estimasi Panel

Variabel	Koefisien Regresi
C	-7.496976
Indeks Pembangunan Manusia	-1.009473*
Indeks Gini	3.740296*
Pengangguran	-0.014507
Ln(Upah Minimum)	6.270585*
R^2	0,9946
Statistik F	0,000

Uji Diagnosis

- (1) Multikolinieritas (VIF)
IPM = 0,617; GINI = 0,617; UNMP = 0,121; lnUMK = 0,457
 - (2) Normalitas
JB₍₂₎ = 21,593; Prob. JB₍₃₎ = 0,000
 - (3) Heteroskedastisitas
IPM = 0,121; GINI = 0,322; UNMP = 0,163; lnUMK = 0,679
 - (4) Autokorelasi
DW = 1,6065
-

Uji Pemilihan Model

- (1) Uji Chow
Cross-section F(34, 101) = 245,552; Prob.F = 0,000
 - (2) Uji Hausman
Cross-section random $\chi^2(4) = 18,044$; Prob $\chi^2 = 0,001$
-

*Keterangan: Tanda * signifikan pada 95%*

Sumber: Data sekunder diolah, 2026

Sebelum pemilihan model yang sesuai dan implementasi pengujian hipotesis, sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap asumsi klasik untuk memastikan bahwa model mematuhi kondisi Best Linear Unbias Estimator (BLUE). Evaluasi ini mencakup normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, yang merupakan komponen fundamental untuk integritas analisis regresi. Hasil diagnostik asumsi klasik, dirinci dalam Tabel 1, menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk data panel memenuhi kriteria yang diperlukan untuk estimasi yang valid.

Pemeriksaan visual dari distribusi residu mengungkapkan bentuk yang relatif simetris yang berpusat di sekitar nol, tanpa outlier yang menonjol; oleh karena itu, asumsi normalitas divalidasi (Apriyanti et al., 2025). Investigasi multikolinieritas mengungkapkan bahwa korelasi maksimum di antara variabel independen – terutama antara Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) – tercatat di 0.6179, yang dianggap dapat diterima. Analisis heteroskedastisitas menegaskan bahwa semua variabel menyajikan probabilitas melebihi 0,05, yang mengarah pada kesimpulan bahwa model menunjukkan homoskedastisitas. Pada akhirnya, statistik Durbin-Watson 1,606547, yang mendekati nilai 2, menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi.

Hasil Tes Chow menunjukkan probabilitas nilai penampang F-cross 0,0000 (<0,05), menghasilkan penolakan hipotesis nol; oleh karena itu, Model Efek Tetap (FEM) dianggap lebih tepat daripada Model Efek Umum (Mauludi & Nur Rahmawati, 2023). Hasil ini menunjukkan heterogenitas tertentu dan tidak dapat diamati di seluruh distrik dan kota. Selain itu, Tes Hausman menghasilkan probabilitas 0,0012 (<0,05), yang mengarah ke penolakan lebih lanjut terhadap hipotesis nol, sehingga menegaskan bahwa FEM lebih akurat daripada Model Efek Acak (Kriskurnia & Wijanarko, 2023). Dari sudut pandang ekonometrik, temuan ini menunjukkan bahwa efek individu berkorelasi dengan variabel independen, menunjukkan bahwa penerapan Model Efek Acak (REM) dapat menghasilkan estimator yang tidak konsisten. Sebaliknya, FEM dengan mahir menangani heterogenitas ini melalui transformasi ekstensif. Akibatnya, berdasarkan hasil kedua tes tersebut, FEM telah

diidentifikasi sebagai model yang paling cocok untuk memeriksa pengaruh variabel independen terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Tabel 2. Hasil Estimasi FEM

$POV_{it} = -7,496 - 1,009IPM_{it} + 3,740GINI_{it} - 0,014UNMP_{it} + 6,270lnUMK_{it}$
$R^2 = 0,9946; DWstat= 1,606; Prob. F = 0,0000$
<i>Keterangan: Tanda * signifikan pada 95%</i>
<i>Sumber: Data sekunder diolah, 2026</i>

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Tes Chow dan Tes Hausman, ditentukan bahwa Model Efek Tetap (FEM) adalah model yang paling tepat karena kemampuannya untuk mengatasi heterogenitas yang tidak diamati namun stabil di seluruh kabupaten atau kota dari waktu ke waktu. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran tidak menunjukkan efek yang signifikan. Bersamaan dengan itu, F-test menghasilkan Prob (F-statistik) sebesar 0,000000 (<0,05), menunjukkan bahwa semua variabel independen secara kolektif memiliki pengaruh penting pada kemiskinan (Sutikno RY et al., 2019). Hasil ini memperkuat kredibilitas empiris model dalam menjelaskan dinamika kemiskinan regional.

Koefisien penentuan R-kuadrat 0,9946, bersama dengan R-kuadrat yang disesuaikan 0,9946, menunjukkan bahwa 99,46% variabilitas kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel yang termasuk dalam model, selain efek tetap yang berkaitan dengan setiap wilayah. Sisa 0,54% dianggap berasal dari faktor-faktor asing yang tidak tercakup oleh model. Nilai yang meningkat seperti itu biasanya diamati dalam Model Efek Tetap, karena kontribusi efek individu dalam merangkum karakteristik spesifik wilayah (Sutikno RY et al., 2019). Akibatnya, seseorang harus berhati-hati ketika menafsirkan kebaikan kecocokan. Singkatnya, model ini menunjukkan kekuatan penjelas yang substansial dalam merinci perbedaan kemiskinan di berbagai wilayah dan dari waktu ke waktu selama periode studi.

Hubungan IPM dengan Kemiskinan

Temuan yang diperoleh dari penyelidikan ini sejalan dengan sejumlah besar penelitian empiris yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh yang sangat merugikan pada kemiskinan, kesimpulan yang dikuatkan oleh Azmi & Cahyono (2025) dan Hutapea et al. (2025). Hasil ini mendukung prinsip teori modal manusia, yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Bukti empiris menunjukkan bahwa daerah yang ditandai dengan peningkatan tingkat pembangunan manusia biasanya menunjukkan tingkat kemiskinan yang berkurang, dikaitkan dengan peningkatan kemampuan individu untuk mengakses peluang ekonomi. Akibatnya, temuan ini memvalidasi pernyataan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi yang layak untuk pengentasan kemiskinan struktural.

Namun, literatur yang ada tidak menyajikan narasi yang homogen. Suryahadi dkk. (2020) menemukan bahwa peningkatan IPM tidak selalu menghasilkan pengaruh langsung pada mitigasi kemiskinan, terutama dalam jangka pendek dan dalam

wilayah yang didominasi oleh sektor informal. Perbedaan tersebut mengungkapkan bahwa kemanjuran HDI secara signifikan bergantung pada kerangka ekonomi dan kapasitas pasar tenaga kerja. Dalam konteks Jawa Tengah di era pasca-pandemi, hasil penyelidikan ini menyiratkan bahwa pemulihan ekonomi yang relatif adaptif memfasilitasi konversi cepat peningkatan kualitas manusia menjadi tingkat pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan IPM harus diintegrasikan dengan inisiatif penciptaan lapangan kerja untuk mengoptimalkan dampaknya pada pengurangan kemiskinan.

Hubungan Ketimpangan dengan Kemiskinan

Hasil yang diperoleh dari estimasi Model Efek Tetap mengungkapkan bahwa Indeks Gini memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah selama jangka waktu 2021-2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas 0,0212 ($< 5\%$) dan koefisien 3,740296, menunjukkan bahwa peningkatan ketidaksetaraan pendapatan sebesar 0,01 poin secara bersamaan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sekitar 0,037 poin persentase, *ceteris paribus*. Secara teoritis, asosiasi ini menggambarkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak adil membatasi akses kelompok berpenghasilan rendah ke sumber daya ekonomi, peluang pendidikan, dan prospek pekerjaan yang produktif. Akibatnya, ketidaksetaraan tidak hanya menandakan kesenjangan pendapatan tetapi juga muncul sebagai penghalang struktural untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks yang lebih luas.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penyelidikan empiris, seperti yang dilakukan oleh Nurmasanti (2026) dan Amponsah et al. (2023), yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan memperkuat tingkat kemiskinan. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa studi alternatif telah mengidentifikasi kondisi di mana efek ketidaksetaraan dapat berkurang atau menjadi dapat diabaikan, terutama dalam skenario yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Perbedaan ini menyiratkan bahwa konsekuensi ketidaksetaraan sebagian besar bergantung pada kualitas distribusi hasil perkembangan. Dalam konteks spesifik Jawa Tengah, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialami belum sepenuhnya inklusif, sehingga eksaserbasi ketidaksetaraan terus secara langsung meningkatkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus diarahkan tidak semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan tetapi juga untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan

Hasil yang diperoleh dari estimasi Model Efek Tetap menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan koefisien positif namun tidak signifikan secara statistik mengenai tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah selama jangka waktu 2021-2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas 0,7599 ($> 5\%$), yang menunjukkan bahwa pengangguran tidak memberikan efek *parSIAL* yang terlihat pada tingkat kemiskinan. Secara teoritis, pengangguran biasanya dikaitkan dengan eskalasi kemiskinan karena erosi sumber pendapatan. Namun demikian, dalam kerangka Indonesia, korelasi ini tidak selalu linier, terutama karena dominasi sektor informal. Sebagian besar tenaga kerja tetap terlibat dalam pekerjaan, meskipun dengan produktivitas dan pendapatan yang berkurang, sehingga tidak diklasifikasikan sebagai pengangguran sementara masih

ada dalam keadaan miskin. Akibatnya, TPT berfungsi sebagai ukuran yang kurang efektif dalam menggambarkan secara akurat kondisi kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya.

Temuan ini sejalan dengan karya Azmi & Cahyono (2025), yang menunjukkan bahwa pengangguran tidak secara konsisten menghasilkan hasil yang signifikan ketika variabel lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketidaksetaraan dimasukkan ke dalam model analitis. Namun, hasil ini kontras dengan Putri et al. (2025), yang mengidentifikasi korelasi positif yang signifikan antara pengangguran dan kemiskinan. Perbedaan tersebut menyiratkan bahwa interaksi antara kedua faktor ini sangat dipengaruhi oleh kerangka ekonomi dan atribut spesifik dari pasar tenaga kerja regional. Dalam lingkungan ekonomi berkembang, fluiditas tenaga kerja antara sektor formal dan informal menjadikan status pengangguran terbuka sebagai cerminan yang tidak memadai dari realitas ekonomi individu. Dengan demikian, kemiskinan lebih dipengaruhi oleh kaliber tingkat pekerjaan dan produktivitas daripada hanya status biner sebagai pekerja atau pengangguran.

Hubungan UMK dengan Kemiskinan

Temuan yang diperoleh dari estimasi Model Ekuitas Tetap menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kotamadya Provinsi Jawa Tengah selama jangka waktu 2021-2024. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi 6,270585 disertai dengan probabilitas 0,0001 ($< 5\%$), menunjukkan bahwa peningkatan 10 persen UMK berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan sekitar 0,627 poin persentase, ceteris paribus. Hasil tersebut menyiratkan bahwa kebijakan upah minimum mungkin tidak selalu mengarah pada peningkatan kesejahteraan yang jelas. Secara teoritis, korelasi antara upah minimum dan kemiskinan rumit, karena peningkatan upah dapat meningkatkan daya beli sekaligus meningkatkan biaya produksi, berpotensi mengarah pada pengurangan tenaga kerja atau transisi ke sektor informal yang ditandai dengan aliran pendapatan yang kurang stabil.

Hasil ini sesuai dengan temuan Sutikno et al. (2019), yang menyimpulkan bahwa kenaikan upah minimum dapat menimbulkan hasil kontraproduktif mengenai kemiskinan, terutama di daerah di mana sektor informal mendominasi. Sebaliknya, temuan ini berbeda dari yang disajikan oleh Setya & Tohirin (2025), yang berpendapat bahwa peningkatan upah minimum dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan menambah daya beli individu. Perbedaan yang diamati menyiratkan bahwa efektivitas kebijakan upah sangat bergantung pada struktur ekonomi yang mendasarinya dan kondisi pasar tenaga kerja yang berlaku. Dalam konteks spesifik Jawa Tengah, heterogenitas regional dan kendala sektor formal meningkatkan kemungkinan dampak buruk, termasuk meningkatnya biaya hidup dan tekanan inflasi, sehingga mengakibatkan demografi tertentu tidak sepenuhnya menuai manfaat yang terkait dengan kenaikan upah minimum.

Simpulan

Studi ini memiliki nilai yang signifikan karena memberikan kontribusi empiris terhadap literatur yang ada mengenai faktor-faktor regional yang mempengaruhi kemiskinan, terutama dalam kerangka era pasca-pandemi, yang belum ditangani secara memadai dalam penelitian sebelumnya. Dari perspektif ilmiah, penyelidikan

ini mendukung pernyataan bahwa kemiskinan adalah masalah multifaset, dibentuk tidak hanya oleh kaliber modal manusia, tetapi juga oleh kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan dinamika kebijakan upah, seperti yang diartikulasikan oleh Kharisma et al. (2026) dan Samiani dkk. (2024). Lebih lanjut, hasil yang menunjukkan peran sepele pengangguran, di samping dampak afirmatif dari upah minimum, menunjukkan bahwa indikator pasar tenaga kerja tradisional mungkin tidak dapat menjelaskan kompleksitas kemiskinan secara andal. Akibatnya, penelitian ini menganjurkan kerangka analisis yang lebih relevan secara kontekstual dan mudah beradaptasi untuk memahami dinamika kemiskinan regional.

PENUTUP

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model yang dilakukan pada dataset kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 2021-2024, penelitian ini menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan efek buruk yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Indeks Gini dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menunjukkan efek positif yang signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, sementara faktor-faktor yang terkait dengan ketidaksetaraan pendapatan dan peraturan upah minimum tampaknya mengintensifkan risiko kemiskinan. Sebaliknya, tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, menyiratkan bahwa kualitas pekerjaan dapat berfungsi sebagai faktor yang lebih penting dalam menentukan kemiskinan daripada hanya status pengangguran terbuka. Secara kolektif, hasil ini menyoroti pentingnya pembangunan manusia dan distribusi pendapatan yang merata sebagai elemen mendasar yang menjelaskan kemiskinan regional, dengan Model Efek Tetap dianggap mampu menangkap kesenjangan antar-daerah secara efektif.

Studi ini bukan tanpa batasan, termasuk ruang lingkup variabel yang terbatas yang mengecualikan faktor penentu makroekonomi lainnya, interval pengamatan yang relatif singkat, dan masalah endogenitas yang tidak ditangani. Selain itu, ketergantungan pada data sekunder memberlakukan batasan pada jaminan kualitas dan konsistensi data, sementara meningkatnya koefisien penentuan memerlukan interpretasi yang hati-hati. Akibatnya, direkomendasikan bahwa upaya penelitian yang akan datang memperluas jangkauan variabel, memperluas kerangka temporal analisis, dan menggunakan teknik ekonometrik yang lebih mahir dalam mengatasi tantangan simultanitas.

Referensi:

- Akbar, A. (2019). Pengaruh Dana ZIS, PDRB, IPM Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: 10 Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2012-2016).
- Amaliah, E. N., Darnah, D., & Sifriyani, S. (2020). Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (Cem), Fixed Effect Model (Fem) Dan Random Effect Model (Rem) (Studi Kasus: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur Tahun 2015-2018). *Estimasi: Journal Of Statistics And Its Application*, 1(2), 106. <https://doi.org/10.20956/Ejsa.V1i2.10574>
- Amponsah, M., Agbola, F. W., & Mahmood, A. (2023). The Relationship Between Poverty, Income Inequality And Inclusive Growth In Sub-Saharan Africa. *Economic Modelling*, 126. <https://doi.org/10.1016/J.Econmod.2023.106415>

- Apriyanti, M., Rospida, L., & Bengkulu, U. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Indeks Gini Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2014-2023. *Jurnal Ilmiah Mea*, 8(2), 2025.
- Arifin, A. S. (2023). Human Capital Investment: Meningkatkan Daya Saing Global Melalui Investasi Pendidikan. *Jurnal Education And Development*, 11(2), 174-179. <https://doi.org/10.37081/Ed.V11i2.4672>
- Arjeti, & Magdalena, L. (2025). Pengaruh Pelayanan Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Di Pt Tri Mandiri Selaras Cabang Sintang. *Fokus*. <https://trimandirigroup.com/tentang>
- Azmi, R., & Cahyono, H. (2025). THE EFFECT OF POPULATION SIZE, OPEN UNEMPLOYMENT RATE, AND POVERTY ON ECONOMIC GROWTH IN EAST JAVA. *Finance: International Journal Of Management Finance*, 2(4), 52-58.
- Badan Pusat Statistika Indonesia. (2025). Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Jenis Kelamin.
- Benavides, F. G., Silva-Peñaherrera, M., & Vives, A. (2022). Informal Employment, Precariousness, And Decent Work: From Research To Preventive Action. In *Scandinavian Journal Of Work, Environment And Health* (Vol. 48, Number 3, Pp. 169-172). Nordic Association Of Occupational Safety And Health. <https://doi.org/10.5271/Sjweh.4024>
- Gomes, D. B. P., Iachan, F. S., & Santos, C. (2020). Labor Earnings Dynamics In A Developing Economy With A Large Informal Sector. *Journal Of Economic Dynamics And Control*, 113. <https://doi.org/10.1016/J.Jedc.2020.103854>
- Hasan, Muhammad, Acai Sudirman, Indarta Priyana, Yullya Ramadonna, Rini Setiowati, Yuan Badrianto, Muhammad Fidiandri Putra, Selvia Nuriasari, Mohamad Firdaus, And Abdi Sakti Walenta. *Human Capital Management (Teori Dan Aplikasi)*. Media Sains Indonesia, 2023.
- Hayati, M. (2025). Perbandingan Model Regresi Data Panel Untuk Analisis Umur Harapan Hidup Di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023. *Journal Of Mathematics: Theory And Applications*, 7(2), 85-96.
- Hutapea, R. O., Triyunita, G., & Amalia, S. N. (2025). The Relationship Between The Human Development Index (Hdi) And Poverty Rate In North Sumatra In 2023: Spearman Correlation Analysis. *Jurnal Nasional Holistic Science*, 5(2), 157-162.
- Jannah, R., Rachmawati, H., & Dhitara, P. Y. A. (2021). Systematic Literature Review Analisis Pengangguran Dan Soft Skill Pada Besaran PDRB Jawa Timur. Muhammadiyah University Purwokerto.
- Kharisma, S., Maulida, S. P., & Caesarani, Y. (2026). Determinant Of Poverty Rates In Indonesia: A Panel Data Regression Analysis. *Journal Of Policy And Sustainable Development Studies*, 1(1), 51-63.
- Kholis, F. N., & Gunarto, T. (2025). Analisis Pengaruh Kesenjangan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung (2012-2023). *Eco-Buss*, 7(3), 2128-2142.
- Kriskurnia, A., & Wijanarko, A. (2023). Analisis Determinan Pada Permintaan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar Dan Sedang Di Tingkat Provinsi Di Indonesia (Vol. 12, Number 1).
- Mahfudhotin, & Sari, K. N. (2025). Panel Data Regression Analysis Utilizing Cem And Fem Methods In Relation To The Profitability Of Sharia Commercial Banks (2015 - 2024). *Journal Focus Action Of Research Mathematic (Factor M)*, 8(2), 242-261. https://doi.org/10.30762/F_M.V8i2.5633
- Mauludi, A. A., & Nur Rahmawati, F. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017 S/D 2021. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10. <https://doi.org/10.1905/Iqtishadia.V10i1.Xxxx>

- Mohini, S. S., & Hasmarini, I. M. I. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2019-2021 (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nabila, S., Nurjanah, S., & Zahra, S. F. (2026). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2024. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 813-833. <https://doi.org/10.63822/1fv89v21>
- Nurhidayah, R., Yahy, I., & Laome, L. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gini Rasio Di Indonesia Menggunakan Regresi Data Panel Arus Jurnal Sains Dan Teknologi. *Arus Jurnal Sains Dan Teknologi (Ajst)*, 3(2), 170-182. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajst>
- Nurmasanti, S. (2026). Analisis Garis Kemiskinan Di Indonesia Menggunakan Gini Ratio, Inflasi, GDP, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Tahun 2010-2023. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 246-258..
- Padmono, O. A. D. (2025). Pengaruh Gini Ratio Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 3(3), 306-319.
- Pratiwi, Z. L. Y. (2025). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2023 (Doctoral Dissertation, IAIN Metro).
- Putri, A. A., Ikbal, M., & Syarigawir, S. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Sinjai. *Abdurrauf Science And Society*, 1(2), 93-106.
- Putri, D. M. (2024). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Selatan. In *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* (Vol. 7, Number 1). <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-ekonomi>
- Putri, R. A., Fadlurohman, A., & Mughni, M. (2025). Panel Data Regression Approach To Identify Factors Affecting Unemployment In East Java Province: Pendekatan Regresi Data Panel Untuk Mengidentifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur. *Journal Of Data Insights*, 3(1), 11-18.
- Samiani, S., Endang, E., Susilo, J. H., & Astuti, H. (2024). Dynamic Panel Data Modeling Of Indonesia's Poverty Level 2013-2022. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 130-147. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21079>
- Saribulan, N., Rasanjani, S., & Dahlawi, D. (2023). Analisis Isi Dan Bibliometrik Isu Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Journal Of Governance And Social Policy*, 4(1), 64-82. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v4i1.31248>
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi Dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Hexagro*, 4(1). <https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371>
- Setya, M. R. T., & Tohirin, A. (2025). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 227-234. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol3.iss2.art13>
- Setyaputri, N. A., Nurfiana, W., Insani, A. N., Nihayah, M. D., & Nuryana, I. (2025). Pengaruh Pdrb, Upah Minimum, Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating The Impact Of Covid-19 On Poverty In Indonesia*. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 175-192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Sutikno R Y, Rotinsul Debby Ch, & Tumangkeng Steeva Y. L. (2019). Pengaruh Upah

Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.

Wijayanti, D., & Raihansyah, M. (2024). Dampak Kemiskinan, Pdrb, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Sebuah Studi Empiris Di Provinsi Riau Tahun 2018-2023. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21(2), 595.

Yulianti, Y., & Qomariah, S. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Ilmu Pengetahuan. *Bahasa Dan Pendidikan*, 5(1), 2962-4797. <https://doi.org/10.55606/Cendikia.V5i1.3512>